

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Kinerja Perusahaan

Kinerja Perusahaan adalah prestasi yang dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi yang dimaksud adalah efektifitas operasional organisasi baik dari segi manajerial maupun ekonomis. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat berapa prestasi keberhasilan atau bahkan kegagalannya. Informasi tentang kinerja organisasi atau perusahaan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya [1].

Penilaian Kinerja Perusahaan merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan proses transaksional seperti merger, akuisisi, dan emisi saham. Melalui penilaian, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangan yang tepat, melakukan phase out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif, menetapkan balas jasa internal dan menentukan harga saham secara wajar. Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi [1].

Konsep kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*. Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa *Raison d'etre* dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang penting. Informasi tentang kinerja organisasi atau perusahaan dapat digunakan

untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya [1].

Ukuran Kinerja Perusahaan dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Perusahaan-perusahaan selama ini lebih banyak menggunakan pengukuran kinerja yang lebih menekankan pada aspek keuangan, yaitu sering disebut dengan pengukuran kinerja tradisional. Kinerja tradisional yang diukur hanyalah berkaitan dengan aspek keuangan. Sedangkan pengukuran lainnya seperti: peningkatan kompetensi dan komitmen personil, peningkatan produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis yang digunakan untuk melayani pelanggan selalu diabaikan oleh manajemen karena sulit dalam pengukurannya. Selama ini pengukuran Kinerja Perusahaan dilakukan melalui pendekatan tradisional yang menitik beratkan pada sisi keuangan seperti *gross profit, return equity, operating income*, dan sebagainya [19].

Pengukuran menggunakan *Return On Assets* sesuai jika analisis ingin memperoleh ukuran terkait efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba bagi perusahaan atau pemilik. Keunggulan kondisi perusahaan dengan menggunakan *Return On Assets* adalah [20] :

- a. *Return On Assets* merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan diperhitungkan
- b. *Return On Assets* mudah dihitung dan dipahami
- c. *Return On Assets* merupakan ukuran yang sesuai diterapkan untuk semua jenis bisnis yang bertujuan untuk mencari laba.

Dalam penelitian ini, Kinerja Perusahaan yang diukur menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya [2].

Dalam penelitian ini Kinerja Perusahaan dirumuskan dengan [2]:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \quad (2.1)$$

### 2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lainnya. Perusahaan yang berukuran lebih besar memiliki kegiatan/aktivitas yang lebih banyak. Perusahaan besar lebih mudah terlihat dan diawasi dengan sangat baik oleh masyarakat dan pemerintah. Secara rasional perusahaan berukuran besar lebih mampu mengungkapkan modal intelektual untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memenuhi harapan masyarakat serta mematuhi norma yang telah ditetapkan [6].

Ada 4 kategori Ukuran Perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 adalah sebagai berikut [21]:

#### 1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### 2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

#### 3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### 4. Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria Ukuran Perusahaan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut [21] :

1. Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Usaha Besar

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Proksi *size* biasanya adalah total aset perusahaan. Karena aset biasanya sangat besar nilainya dan untuk menghindari bias skala besar maka besaran aset perlu

dikompres. Secara umum proksi *size* dipakai Logaritma (log) atau *Logaritma Natural asset* [22].

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dirumuskan dengan [22]:

$$Size = Ln (Total Aset) \quad (2.2)$$

Dimana :

*Size* : Ukuran Perusahaan

*Ln* : Logaritma natural

### 2.1.3 *Leverage*

Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah pinjaman atau modal sendiri. Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Dalam hal ini *Leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya besarnya jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru [9].

*Leverage* keuangan mengacu pada jumlah pendanaan hutang dalam struktur modal perusahaan. *Leverage* keuangan (*financial leverage*) merupakan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba. *Leverage* memperbesar keberhasilan (laba) dan kegagalan (rugi) manajerial. Hutang yang terlalu besar menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar kesempatan yang menguntungkan. Kreditor lebih menyukai peningkatan modal ekuitas sebagai pelindung atas kerugian pada saat-saat sulit [23].

Modal hutang (*debt*) jangka pendek maupun jangka panjang harus dilunasi. Semakin lama jangka waktu pelunasan (*repayment period*) hutang dan semakin kecil tuntutan ketentuan pelunasannya, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk melunasi modal hutang. Namun, hutang harus dilunasi pada waktu yang telah

ditentukan terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, dan juga bunga periodik yang terdapat pada kebanyakan hutang. Kegagalan membayar pokok pinjaman dan bunga biasanya berujung pada proses hukum, di mana pemegang saham biasa dapat kehilangan kendali terhadap perusahaan dan sebagian atau seluruh investasi mereka. Semakin besar proporsi hutang dalam struktur total modal perusahaan, semakin tinggi beban tetap dan komitmen pembayaran kembali (pelunasan) yang ditimbulkan. Kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman saat jatuh tempo serta potensi kreditor mengalami kerugian juga meningkat. *Leverage* memperbesar kesuksesan (laba) maupun kegagalan (rugi) manajerial [12].

Dalam penelitian ini, *Leverage* menggunakan *Long Term Debt to Equity Ratio*. *Long Term Debt to Equity Ratio* merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan [9].

Dalam penelitian ini *Leverage* dirumuskan dengan [9]:

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4 Likuiditas

Likuiditas (*liquidity*) adalah kemampuan untuk mengkonversikan aset menjadi kas atau untuk memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek biasanya dipandang sebagai periode hingga satu tahun atau diidentifikasi sebagai siklus operasi normal perusahaan (periode waktu yang mencakup siklus pembelian, produksi, penjualan, dan penagihan). Pentingnya Likuiditas sebaiknya dipandang dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya [12].

Penyebab utama kekurangan dan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya tersebut sebenarnya adalah akibat kelalaian manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kemudian, sebab lainnya adalah sebelumnya pihak perusahaan sudah dalam keadaan tidak mampu lagi karena nilai hutangnya lebih tinggi dari harta lancarnya. Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama hutang jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan

oleh berbagai faktor [9]:

1. Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali
2. Bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aset lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan atau aset lainnya.

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio Likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat waktu [9].

Salah satu jenis pengukuran rasio Likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aset lancar dengan total hutang lancar. Aset lancar (*current assets*) merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Hutang lancar (*current liabilities*) merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya hutang ini segera harus dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun [9].

Digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran Likuiditas mencakup kemampuan untuk mengukur [12]:

1. Cakupan liabilitas jangka pendek

Semakin tinggi jumlah (kelipatan) aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek, semakin besar jaminan yang kita miliki bahwa Liabilitas jangka pendek yang akan dibayarkan.

## 2. Penyangga (*buffer*) saat terjadi kerugian

Semakin besar *buffer*, maka semakin kecil resiko. Rasio lancar menunjukkan *margin of safety* yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar nonkas ketika akhirnya aset tersebut dilepas atau dilikuidasi.

## 3. Cadangan dana likuid

Rasio lancar sangat relevan sebagai ukuran *margin of safety* terhadap ketidakpastian dan guncangan arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan guncangan, seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat sewaktu-waktu dan tanpa diperkirakan menurunkan arus kas.

Dalam penelitian ini likuiditas dirumuskan dengan [9] :

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.4)$$

Dimana :

*Current Assets* = Aset Lancar

*Current Liabilities* = Hutang/Kewajiban Lancar

### 2.1.5 Penghindaran Pajak

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penghindaran Pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran Pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang [24].

*Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah upaya Penghindaran Pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [14].

*Tax evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak



menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance* [14].

Semakin besar beban pajak, maka semakin kuat motif dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak karena Wajib Pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi tetapi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah. Prinsip utama penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dibedakan menjadi 3 prinsip, yaitu [25]:

1. Menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*)
2. Memilih tarif pajak yang lebih rendah (*different marginal tax rates*)
3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai penghasilan yang memiliki tarif berbeda-beda (*manipulation of different types of income that are taxed to different degrees*)

Pada dasarnya kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran Pajak hanya dapat dibenarkan sepanjang di dalam ketentuan perpajakan. Penundaan pembayaran pajak yang didasarkan atas kebijakan perusahaan tentu tidak dapat dibenarkan, kecuali ada dasar hukum khusus yang kuat untuk itu, misalnya penundaan karena adanya fasilitas penundaan atas industri-industri tertentu dalam rangka investasi. Dunia usaha bisnis ditujukan untuk memperoleh laba yang besar. Adanya pilihan tarif pajak yang bertingkat-tingkat (*tariff progresif*) tentu memberikan peluang untuk memilih tarif, karena wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan usahanya untuk terhindar dari pengenaan tarif yang tinggi. Dalam hal upaya penghindaran ini terkait dengan penggelapan penghasilan kena pajak maka tidak dapat dibenarkan. Kebijakan pajak perusahaan haruslah sejalan dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan komersial menggambarkan Kinerja Perusahaan yang ditujukan untuk manajemen maupun *shareholder* dan *stakeholder* lainnya yang terkait. Prinsip yang digunakan adalah standar akuntansi yang berlaku. Sebaliknya laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung seberapa besar pajak

yang seharusnya terutang yang didasarkan pada aturan perpajakan [25].

Dalam penelitian ini Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan yang memiliki ETR yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi dimasa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan akrual yang terkandung dalam *deffered tax expense*, yaitu dengan membuat *deffered tax expense* menjadi lebih kecil. ETR merupakan rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dirumuskan dengan [26]:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad (2.5)$$

### 2.1.6 Agency Cost

*Agency Cost* (Biaya Agensi) adalah seluruh beban atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan potensi konflik atau mengharmoniskan kepentingan kedua belah pihak. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka mengendalikan tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan disebut *Agency Cost*. Permasalahan keagenan (*agency problem*) atau permasalahan hubungan antara kedua belah pihak, berangkat dari konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Konflik kepentingan tersebut timbul sebagai akibat pemisahan antara manajer sebagai agen yang dipercaya untuk mengelola perusahaan dengan pihak pemilik perusahaan. Ketika perusahaan sepenuhnya (100%) dimiliki oleh manajer sendiri maka tidak ada permasalahan keagenan, karena *agent* dan *principal* adalah orang yang sama [17].

Biaya Keagenan mencakup seluruh biaya atau beban baik riil maupun non riil yang ditanggung dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian atau monitoring terhadap manajemen. Meningkatnya pengawasan akan meningkatkan efektifitas kinerja manajemen sesuai kepentingan pemilik perusahaan (*principal*), sehingga akan menekan Biaya Keagenan (*Agency Cost*). Meningkatnya efektifitas kinerja manajemen disertai menurunnya biaya keagenan akan mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan. Berikut ini beberapa contoh dari Biaya Kegaenan [17] :

- a. Biaya auditing oleh pihak independen

- b. Biaya penyelenggaraan sistem pengendalian internal termasuk sistem akuntansi
- c. Biaya pembentukan dan biaya gaji para anggota dewan pengawas atau dewan komisaris perusahaan
- d. Kerugian yang ditanggung perusahaan sebagai akibat dari tindakan atau kebijakan yang tidak produktif dari manajemen
- e. Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan di dalam perjanjian hutang, seperti pembatasan terhadap pembagian dividen kepada pemegang saham
- f. Penetapan struktur insentif/kompensasi bagi manajemen dan sejenisnya

Sebagai contoh lainnya, pemegang saham menanggung Biaya Agensi ketika manajer gagal membuat keputusan investasi terbaik atau ketika manajer harus dipantau untuk memastikan bahwa keputusan investasi terbaik dibuat karena situasi yang mana pun cenderung menghasilkan harga saham yang lebih rendah. Tema penting tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan akuntabilitas manajer dalam suatu organisasi melalui mekanisme yang mencoba mengurangi atau menghilangkan masalah agen utama; ketika mekanisme ini gagal, bagaimanapun, masalah agensi muncul. Masalah keagenan muncul ketika manajer menyimpang dari tujuan memaksimalkan wealth pemegang saham dengan menempatkan tujuan personal mereka di atas tujuan pemegang saham. Masalah ini pada gilirannya menimbulkan Biaya Agensi [27].

Pihak manajemen dapat dianggap sebagai *agen* dari para pemilik perusahaan, yaitu sebagai para pemegang saham. Para pemegang saham ini, dengan harapan bahwa agen akan bertindak demi kepentingan para pemegang saham, akan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan ke pihak manajemen. Agar pihak manajemen dapat membuat keputusan yang optimal atas nama para pemegang saham, merupakan hal yang penting bahwa pihak manajemen tidak hanya mendapat insentif yang tepat (gaji, bonus, opsi saham, dan “berbagai tunjangan dan fasilitas”), tetapi mereka akan diawasi juga. Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti : pengikatan (*bonding*) agen, audit laporan keuangan, dan secara eksplisit membatasi keputusan pihak manajemen. Para kreditur mengawasi perilaku pihak manajemen dan pemegang saham dengan membelakakan perjanjian jaminan dalam kesepakatan pinjaman antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Aktivitas pengawasan yang dimaksudkan tentunya melibatkan biaya [28].

Rasio biaya operasional menunjukkan persentase biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya kegiatan operasi, umum, dan administrasi perusahaan. Rasio ini mempertimbangkan biaya operasional yang tidak dibahas dalam gross profit margin, namun menunjukkan berapa besar biaya untuk menjalankan perusahaan termasuk biaya penjualan dan pemasaran serta biaya administrasi perusahaan [29].

Dalam penelitian ini *Agency Cost* dirumuskan dengan [29]:

$$Agency\ Cost = \frac{Beban\ operasi,\ umum,\ dan\ administrasi}{Total\ penjualan} \quad (2.6)$$

## 2.2 Review Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Perusahaan sebagai variabel dependen dalam penelitian, antara lain :

1. Apri Dwi Astuti, Abdul Rahman, dan Sudarno (2015)

Apri Dwi Astuti, Abdul Rahman, dan Sudarno melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Agency Cost* sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2013 yang memenuhi kriteria adalah 102 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan sedangkan *Agency Cost* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Perusahaan [10].

2. Enni Savitri (2018)

Enni Savitri melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “*Relationship Between Family Ownership, Agency Cost Towards Financial Performance And Business Strategy As Mediation*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2014. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2007-2014 yang memenuhi kriteria adalah 45 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Biaya Agensi, Kepemilikan Keluarga, dan Strategi Bisnis berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [18].

3. Hanny, Vinola Herawaty, dan Hasnawati (2018)

Hanny, Vinola Herawaty, dan Hasnawati melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Tax Avoidance*, *Corporate Governance*, dan *Dividen Pay Layout Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2013-2017 yang memenuhi kriteria adalah 154 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Tax Avoidance*, *Corporate Governance*, dan *Dividen Pay Layout Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, sedangkan Strategi Bisnis tidak memperkuat pengaruh positif *Tax Avoidance*, *Corporate Governance*, serta memperlemah pengaruh positif *Dividen Pay Layout* [15].

4. Jufrizen, Aghnia Meilana Putri, Maya Sari, Radiman, dan Muslih (2019)

Jufrizen, Aghnia Meilana Putri, Maya Sari, Radiman, dan Muslih melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Debt Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return on Asset pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2013-2017 yang memenuhi kriteria adalah 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial *Debt Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio* dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan [11].

5. Kicky Amalia dan Anita Roosmalina Matusin (2016)

Kicky Amalia dan Anita Roosmalina Matusin melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Pengaruh *Ownership Concentration* dan *Ownership Composition* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan *Non Financial* di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2010-2014 yang memenuhi kriteria adalah 135 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Ownership Concentration* berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan, *Institutional*

*Ownership* berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan, *Government Ownership* berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan berdasarkan ROA, *Families (Individual)* Ownership tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [30].

6. Michael Hidayat (2018)

Michael Hidayat melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2014 yang memenuhi kriteria adalah 30 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Independen, *Leverage*, Dewan Direksi Wanita berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Sedangkan variabel Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Usia Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [8].

7. Ni Made Dwi Ratna Sari dan I Gusti Ayu Agung Omika Dewi (2019)

Ni Made Dwi Ratna Sari dan I Gusti Ayu Agung Omika Dewi melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Carbon Credit*, *Firm Size*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2015-2017 yang memenuhi kriteria adalah 25 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial *Carbon Credit*, *Firm Size*, Dewan Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan [7].

8. Rike Yolanda Panjaitan (2018)

Rike Yolanda Panjaitan melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Pada BEI Pada Tahun 2013-2017)”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Tax*

*Avoidance* dan *Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Secara parsial *Tax Avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [16].

9. Suwardi Simon dan Ratnawati Kurnia (2017)

Suwardi Simon dan Ratnawati Kurnia melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Likuiditas, Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2013-2015)”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2013-2017 yang memenuhi kriteria adalah 19 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Likuiditas, Kepemilikan manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Secara parsial Likuiditas dan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, serta Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [13].

**Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang Diperoleh</b>
Apri Dwi Astuti, Abdul Rahman, dan Sudarno (2015)	Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan <i>Agency Cost</i> Sebagai Variabel Moderasi	<b>Variabel Dependen:</b> Kinerja Perusahaan <b>Variabel Independen:</b> Kepemilikan Keluarga <b>Variabel Moderasi :</b> <i>Agency Cost</i>	<b>Secara Parsial:</b> a. Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan b. <i>Agency Cost</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Perusahaan
Enni Savitri (2018)	Relationship Between Family Ownership, Agency Costs Toward Financial Performance And Business Strategy As Mediation	<b>Variabel Dependen:</b> Financial Performance <b>Variabel Independen:</b> a. Family Ownership b. <i>Agency Costs</i> <b>Variabel Moderasi:</b> Business Strategi	<b>Secara Parsial:</b> a. Biaya agensi, Kepemilikan Keluarga, dan Strategi Bisnis berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan b. Strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

Tabel 2.1 Sambungan

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang Diperoleh</b>
Hanny, Vinola Herawaty, Hasnawati (2018)	Pengaruh <i>Tax Avoidance, Corporate Governance, dan Dividen Pay Layout</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi	<b>Variabel Dependen:</b> Kinerja Perusahaan  <b>Variabel Independen:</b> a. <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Corporate Governance</i> c. <i>Dividen Pay Layout</i>	<b>Secara Parsial :</b> a. <i>Tax Avoidance, Corporate Governance, Dividen Pay Layout</i> berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan b. Strategi Bisnis tidak memperkuat pengaruh positif <i>Tax Avoidance, Corporate Governance, Dividen Pay Layout</i> terhadap Kinerja Perusahaan.
Jufrizen, Aghina Meilana Putri, Maya Sari, Radiman, Muslih (2019)	Pengaruh Debt Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<b>Variabel Dependen:</b> Kinerja Perusahaan  <b>Variabel Independen:</b> a. <i>Debt Ratio</i> b. <i>Long Term Debt to Equity Ratio</i> c. Kepemilikan Institusional	<b>Secara Simultan:</b> <i>Debt Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio</i> , dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.  <b>Secara Parsial:</b> a. Debt Ratio, <i>Long Term Debt to Equity Ratio</i> dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan
Kicky Amalia, Anita Roosmalina Matusin (2016)	Analisis Pengaruh <i>Ownership Concentration dan Ownership Composition</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Non Financial di Indonesia	<b>Variabel Dependen:</b> Kinerja Perusahaan  <b>Variabel Independen:</b> a. <i>Ownership Concentration</i> b. <i>Ownership Composition</i>	<b>Secara Parsial:</b> a. <i>Ownership Concentration, Institutional, Ownership dan Government Ownership</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan b. <i>Families (Individual) Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan



Tabel 2.1 Sambungan

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang Diperoleh</b>
Michael Hidayat (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan	<p><b><u>Variabel Dependen:</u></b> Kinerja Perusahaan</p> <p><b><u>Variabel Independen:</u></b> a. Dewan Independensi b. Ukuran Dewan Direksi c. Ukuran Perusahaan d. Umur Perusahaan e. Likuiditas f. <i>Leverage</i> g. Kepemilikan Manajerial h. Dewan Direksi Wanita</p>	<p><b><u>Secara Parsial:</u></b> a. Direksi Wanita dan Dewan Independen berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan b. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan c. Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Likuiditas dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.</p>
Ni Made Dwi Ratna Sari, I Gusti Ayu Agung Omika Dewi (2019)	Pengaruh Carbon Credit, Firm Size, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p><b><u>Variabel Dependen:</u></b> Kinerja Perusahaan</p> <p><b><u>Variabel Independen:</u></b> a. <i>Carbon Credit</i> b. <i>Firm Size</i> c. <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p><b><u>Secara Simultan:</u></b> <i>Carbon Credit</i>, <i>Firm Size</i>, dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.</p> <p><b><u>Secara Parsial:</u></b> a. <i>Carbon Credit</i>, <i>Firm Size</i>, Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan</p>
Rike Yolanda Panjaitan (2018)	Pengaruh Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Pada BEI Pada Tahun 2013-2017)	<p><b><u>Variabel Dependen:</u></b> Kinerja Perusahaan</p> <p><b><u>Variabel Independen:</u></b> a. <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Leverage</i></p>	<p><b><u>Secara Simultan:</u></b> <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.</p> <p><b><u>Secara Parsial:</u></b> a. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan b. <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan</p>

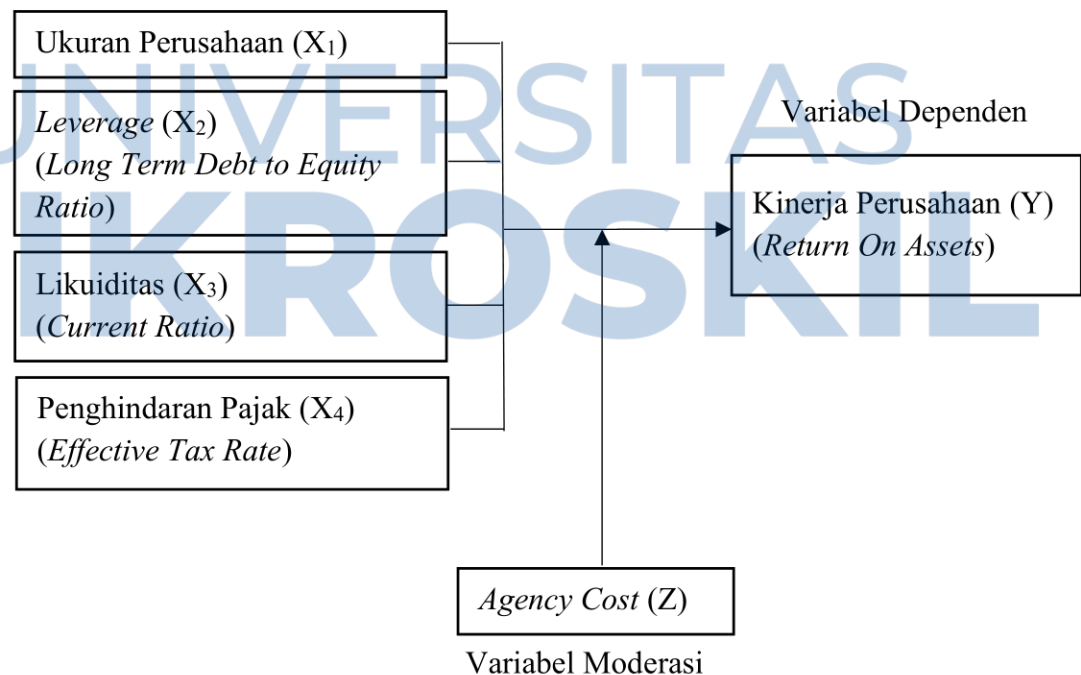
Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Suwandi Simon, Ratnawati Kurnia (2017)	Likuiditas, Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2013-2015)	<b>Variabel Dependen:</b> Kinerja Perusahaan  <b>Variabel Independen:</b> a. <i>Likuiditas</i> b. <i>Good Corporate Governance</i> c. Ukuran Perusahaan	<b>Secara Simultan:</b> Likuiditas, Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan  <b>Secara Parsial:</b> a. Likuiditas, Ukuran Dewan, berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan b. Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah kerangka konseptual pada penelitian ini :

Variabel Independen



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kinerja Perusahaan dan variabel

moderasi adalah *Agency Cost*. Variabel Independen terdiri dari Ukuran Perusahaan, *Leverage* yang diproksikan dengan *Long Term Debt to Equity Ratio*, Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio*, dan Penghindaran Pajak.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Agency Cost* sebagai Variabel Moderasi

Ukuran Perusahaan yang besar akan mencerminkan bagaimana keunggulan pertumbuhan perusahaan yang meningkat. Ukuran Perusahaan akan mempengaruhi Kinerja Perusahaan, dikarenakan bagaimana perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sehingga memperoleh laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan tentu saja menunjukkan Ukuran Perusahaan tersebut semakin besar serta akan mempengaruhi Kinerja Perusahaan tersebut semakin tinggi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [7].

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan akan meningkatkan apabila *Agency Cost* dapat dikendalikan secara optimal. Biaya Agensi yang muncul dengan tingkat yang signifikan akan mempengaruhi Ukuran Perusahaan tersebut menjadi kecil. Ketika Biaya Agensi perusahaan besar, akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat konflik keagenan yang tinggi yaitu bagaimana perusahaan menjalankan pengoperasian yang tidak stabil sehingga akan berdampak negatif pada Kinerja Perusahaan. Dengan kata lain, meminimalkan Biaya Agensi perusahaan dapat meningkatkan Ukuran Perusahaan serta meningkatkan Kinerja Perusahaan.

$H_{1a}$  : Ukuran Perusahaan mempengaruhi Kinerja Perusahaan

$H_{2a}$  : *Agency Cost* mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan

### 2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Agency Cost* sebagai Variabel Moderasi

*Leverage* merupakan rasio hutang perusahaan dimana dengan memanfaatkan

hutang sebagai salah satu sumber modal dalam menjalankan kegiatan guna untuk mencapai laba yang maksimal. Bagaimana perusahaan dalam menggunakan hutang yang tinggi serta timbulnya bunga, tentu saja akan meningkatkan potensi atas pengembalian hutang tersebut menjadi laba. Tingkat hutang yang tinggi menentukan bagaimana perusahaan meningkatkan Kinerja Perusahaan untuk kegiatan operasional dalam mencapai pendapatan untuk melunasi hutang beserta bunganya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [10].

Penggunaan hutang yang tinggi akan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan apabila *Agency Cost* kecil. Ketika perusahaan menggunakan hutang yang cukup tinggi, hal ini dilihat bagaimana kreditur akan mengawasi perusahaan dapat memanfaatkan penggunaan dana sehingga akan berdampak bagaimana Kinerja Perusahaan tersebut meningkat. Pengawasan dari kreditur akan berdampak pada Biaya Agensi yang semakin kecil, sehingga penggunaan hutang yang tinggi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan.

$H_{1b}$ : *Leverage* mempengaruhi Kinerja Perusahaan

$H_{2b}$ : *Agency Cost* mampu memoderasi hubungan antara *Leverage* dengan Kinerja Perusahaan

#### **2.4.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Agency Cost* sebagai Variabel Moderasi**

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam membiayai hutang jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi rasio Likuiditas perusahaan maka akan berdampak pada Kinerja Perusahaan yang baik dikarenakan perusahaan mampu mengkondisikan kegiatan operasional dengan mendapatkan keuntungan atas memanfaatkan aset perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [13].

Pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Perusahaan akan meningkat apabila *Agency Cost* kecil. Sebaliknya, semakin kecil rasio Likuiditas perusahaan maka akan mempengaruhi Kinerja Perusahaan ketika Biaya Keagenan besar. Biaya Agensi yang tinggi menunjukkan ketidakstabilan perusahaan dalam pemanfaatan aset. Perusahaan

dapat meminimalkan Biaya Agensi ketika memanfaatkan penggunaan aset untuk aktivitas perusahaan guna untuk menutup hutang jangka pendek. Perolehan pendapatan yang tinggi dengan biaya yang sedikit tentu aja akan mempengaruhi Kinerja Perusahaan.

$H_{1c}$  : Likuiditas mempengaruhi Kinerja Perusahaan

$H_{2c}$  : *Agency Cost* mampu memoderasi hubungan antara Likuiditas dengan Kinerja Perusahaan

#### **2.4.4 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Agency Cost* sebagai Variabel Moderasi**

Penghindaran Pajak merupakan salah satu faktor perusahaan dalam meningkatkan laba bersih setelah pajak. Aktivitas Penghindaran Pajak dilakukan dengan meminimalkan setiap beban pajak yang dikeluarkan, hal ini berpotensi untuk perusahaan melakukan kinerja yang lebih baik. Ketika beban pajak perusahaan yang dibayarkan semakin kecil, maka akan mempengaruhi Kinerja Perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan [15].

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Perusahaan meningkatkan apabila *Agency Cost* meningkat. Hal ini karena adanya perbedaan kepentingan dimana pihak manajemen menginginkan peningkatan kesejahteraan perusahaan sedangkan perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan penekanan pembayaran pajak yang rendah. Konflik keagenan muncul sehingga *Agency Cost* perusahaan harus dapat dikendalikan ketika saat melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk meningkatkan laba sehingga Kinerja Perusahaan lebih optimal untuk mencapai tujuan antara manajemen dengan para pemegang saham.

$H_{1d}$  : Penghindaran Pajak mempengaruhi Kinerja Perusahaan

$H_{2d}$  : *Agency Cost* mampu memoderasi hubungan antara Penghindaran Pajak dengan Kinerja Perusahaan